



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : KPW PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDWIN PERMADI
2. Jabatan : EKONOM AHLI
3. NHK : 463306

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **7.700.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/204 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 80 m2/90 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 18 m2/18 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/53 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 55 m2/69 m2 di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **432.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000



3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000
4. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 9.050.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.570.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 300.000.000

Sub Total Rp. 10.012.050.000

III. HUTANG Rp. 843.755.473

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 9.168.294.527

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.